IMPLEMENTASI PROGRAM PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) DI KECAMATAN CURUG KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

Oleh:
Ifda Roflianti[1)], Suwaib Amirudin[2)], Tiwi Rizkiyani[3)]
6661200030@untirta.ac.id
Prodi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Kecamatan Curug Kota Serang merupakan kecamatan di Kota Serang yang paling rentan rawan pangan, oleh karena itu melalui program P2L masyarakat diberdayakan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Dianalisis dengan teknis analisis data lewat pengumpulan data, redukasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, membercheck, dan ethical consideration. Fokus penelitian ini ialah pada Implementasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kecamatan Curug masih belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan masih terdpat beberapa kekurangan dan hambatan yang terjadi seperti minimnya penyuluh pendamping program, berhentinya kegiatan pertanaman dibeberapa KWT, menurunnya kekatifan anggota, ketersediaan sarana dan prasarana yang minim, perjanjian peminjaman lahan yang buruk, ketersediaan uang kas yang tidak memadai. Oleh karena itu, program Pekarangan Pangan Lestari di Kecamatan Curug Kota Serang memerlukan perbaikan dan ini dilakukan dengan melakukan kerjasama antar berbagai pihak baik DKP3, penyuluh di BPP, maupun KWT sebagai penerima manfaat program, agar pelaksanaan KWT dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: Implementasi Program, Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Kelompok Wanita Tani (KWT)

ABSTRACT

Curug Sub-district of Serang City is the sub-district in Serang City that is most vulnerable to food insecurity, therefore through the P2L program the community is empowered to realize food security. The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation studies. Analyzed with data analysis techniques through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity testing is done through triangulation, membercheck, and ethical consideration. The focus of this research is on the Implementation of the Sustainable Food Yard Program (P2L) in Curug District, Serang City, Banten Province. The results showed that the implementation of the Sustainable Food Yard (P2L) program in Curug District is still not running optimally. This is because there are still some shortcomings and obstacles that occur such as the lack of program assistants, the cessation of planting activities in some KWT, the decline in member

activeness, the availability of minimal facilities and infrastructure, poor land loan agreements, inadequate cash availability. Therefore, the Sustainable Food Yard program in Curug District, Serang City requires improvement and this is done by collaborating between various parties, both DKP3, extension workers at BPP, and KWT as program beneficiaries, so that the implementation of KWT can run well.

Keywords: Program Implementation, Sustainable Food Yard (P2L), Women Farmers Group (KWT).

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang harus dipenuhi sebab menjadi kebutuhan dasar yang paling utama yang pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 28 C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya Dalam upaya pembangunan pangan dan gizi, keterkaitannya erat dengan pencapaian ketahanan pangan (Chaireni et al., 2020).

Ketahanan pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Upaya dan komitmen pemerintah telah dilakukan dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat. Dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan pertanian melalui peningkatan ketahanan pangan menjadi salah satu fokus pemerintah termasuk di dalamnya perihal diversifikasi atau penganekaragaman pangan.

Diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan sebagai salah satu upaya menuju ketahanan pangan sangat penting dilakukan khususnya dalam upaya mencapai pola konsumsi pangan yang bergizi,

beragam, seimbang, aman, dan mampu menghindarkan ketergantungan Rumah Tangga terhadap satu jenis pangan (Oktarina et al., 2023).

Kebijakan penganekaragaman pangan dimulai dari Kementerian Pertanian Indonesia melalui Badan Ketahanan Pangan lewat program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Program ini sebelumnya bernama Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dijalankan sejak tahun 2010 hingga 2019, yang kemudian untuk memperluas manfaat program diubah menjadi P2L pada tahun 2020 dengan dasar hukum program yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Syaifullah, 2022).

Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) merupakan program yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersedian, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan. Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) telah dilaksanakan hampir diseluruh wilayah yang ada di Indonesia, termasuk di Kota Serang Banten.

Implementasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang untuk mengupayakan kecukupan pemenuhan pangan dengan memanfaatkan lahan kosong yang tidak termanfaatkan dengan memberdayakan masyarakat terutama kelompok wanita tani (KWT) yang menjadi sasaran dalam program ini. Terdapat 43 kelompok wanita tani yang mengupayakan pemanfaatan pekarangan pada program P2L di Kota Serang.

Kota Serang menjadi salah satu Kota di Provinsi Banten yang melaksanakan program P2L dan merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian. Meskipun berkarakteristik perkotaan, produksi pertanian di Kota Serang memiliki potensi yang besar, yaitu dari tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, hasil perkebunan dan perikanan baik perikanan laut maupun darat. Program ini penting sebab Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi

Banten masih memiliki permasalahan terkait dengan pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

Hasil perhitungan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang dirilis oleh Badan Pangan Nasional dalam lima tahun terakhir, yaitu tahun 2019 sampai tahun 2023 menunjukkan bahwa dalam perwujudan ketahanan pangan di Kota Serang masih memperlihatkan adanya kelemahan dalam mewujudkan ketahanan pangan, Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 1

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2019-2023

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Pangan (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Serang	77,95	77,07	77,70	78,63	79,26
2	Kabupaten Lebak	71,67	70,78	72,60	71,96	72,32
3	Kabupaten Tangerang	75,54	72,47	76,07	77,00	76,49
4	Kabupaten Pandeglang	71,14	72,59	73,39	72,32	74,87
5	Kota Tangerang Selatan	86,39	83,14	83,74	78,74	87,43
6	Kota Serang	61,40	61,22	61,24	59,88	71,42
7	Kota Cilegon	73,78	70,23	71,42	72,63	81,54
8	Kota Tangerang	81,53	80,37	78,88	79,08	86,39
Provinsi Banten		74,47	73,48	74,38	73,78	78,71

Sumber: Olah data penelitian dari Badan Pangan Nasional, 2024.

Berdasarkan Tabel 1, Kota Serang memiliki skor indeks ketahanan pangan (IKP) yang paling kecil diantara wilayah Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Pada tahun 2019, skor indeks ketahanan pangan Kota

Serang sebesar 61,40; namun kemudian turun menjadi 61,22 pada tahun 2020; 61,24 pada tahun 2021 dan turun kembali pada tahun 2022 menjadi 59,88; namun pada tahun 2023 justru angkanya naik pesat menjadi 71,42. Walaupun mengalami kenaikan pada 2023, ketahanan pangan di Kota Serang masih belum maksimal.

Kecamatan Curug dan Taktakan menjadi kecamatan yang memiliki penerima manfaat KWT paling banyak, yaitu sebanyak 12 KWT pada Kecamatan Taktakan dan 9 KWT di Kecamatan Curug. Akan tetapi, 3 KWT di Kecamatan Curug berstatus tidak aktif dan 1 berstatus kurang aktif, hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Curug.

Dibalik potensinya yang besar, Kecamatan Curug masih menjadi kecamatan di Kota Serang yang masih tergolong rentan rawan pangan jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Serang. Hal ini dapat dilihat dari perolehan indeks komposit bulanan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 2

Indeks Komposit Bulanan (IKB) Per-Kecamatan di Kota Serang Tahun 2023

No	Kecamatan	Indeks Komposit Bulanan (IKB)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
1	Curug	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1
2	Walantaka	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Cipocok Jaya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
4	Serang	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3
5	Taktakan	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2
6	Kasemen	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang, 2024.

Kecamatan Curug pada tahun 2023 terutama pada bulan Oktober hingga bulan Desember memperoleh indeks komposit bulanan paling rendah dibandingkan dengan lima kecamatan lain di Kota Serang. Perolehan indeks komposit sebesar dua menandakan bahwa Kecamatan Curug berada pada kategori waspada dan skor satu untuk kategori rentan rawan pangan. Perolehan skor indeks komposit bulan didapatkan melalui akumulasi poin dalam indeks ketersediaan melalui indikator luas tanam, indeks akses pangan melalui indikator luas puso, harga ditingkat konsumen, dan indeks pemanfaatan pangan melalui status gizi balita.

Pelaksanaan program P2L di Kecamatan Curug masih terdapat permasalahan yang masih ditemui seperti minimnya penyuluh pendamping pada Program P2L, menurunnya partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani dalam menjalankan program P2L, kurangnya perawatan rumah bibit dan demplot. Dengan latar belakang tersebut, maka menjadi penting untuk kemudian diketahui secara lebih mendalam bagaimana implementasi program dengan maalah dan kendala yang dihadapi serta penyebabnya. Tujuan penelitian dalam penelitian ini kemudian untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokus penelitian daam penelitian ini ialah Kecamatan Curug kota Serang didasari pada karakteristik yang kuat pada lokasi tersebut dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh sebab sesuai, serta tepat untuk dilakukan penelitian sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Fokus penelitian ini ialah pada Implementasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kecamatan Curug Kota

Serang Provinsi Banten. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian menggunakan teori dari Marilee S. Grindle (1980) yang terdiri dari dimensi yaitu Isi Kebijakan (*content of policy*), Lingkungan Kebijakan *(context of implementation)*.

Dalam penelitian ini, informan dibagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan.* Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan teknik *purposive* dengan kriteria tertentu. Namun, tergantung pada kebutuhan di lapangan, peneliti juga dapat menggunakan teknik *snowball,* di mana jumlah informan dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Dianalisis dengan teknis analisis data dari Miles, Huberman & Saldana yang terdiri dari pengumpulan data, redukasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, *membercheck,* dan *ethical consideration.*

PEMBAHASAN

Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) meruakan program yang dibentuk oleh pemerintah melalui Dirjen Hortikultura Kemnterian Pertanian untuk mengupaya ketahanan pangan masyarakat dalam segi penyediaan akses, ketersediaan, serta pemanfaatan pangan dalam upaya mewujudkan diversifikasi pangan. Terdapat beberapa kegiatan yang terdapat dalam program P2L yaitu rumah bibit, demplot, pertanaman anggota, serta kegiatan pasca panen. Terdapat kegiatan pemasaran yang dilakukan dalam program P2L di mana hasil tanaman yang dihasilkan dari rumah bibit dan demplot dapat dipasarkan untuk menambah uang kas kelompok KWT. Jenis tanaman yang ditanam ialah tanaman yang berorientasi pasar serta memiliki masa panen yang relatif cepat sehingga dapat dengan mudah menghasilkan penyediaan pangan bagi masyarakat.
Adapun kemudiapelaksanaan program P2L di Kecamatan Curug menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Marilee S Grindle, yang terdiri dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Isi kebijakan

terdiri dan lingkungan kebijakan. Adapun pembahasan yang dapat peneliti paparkan, sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan

1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan menyangkut kepentingan yang mendasari dibentuknya program P2L, pemerintah pusat sebagai pihak yang menyusun program kebijakan melalui dirjen hortikultura, dasar hukum program yaiu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, kepentingan ini menyangkut kepentingan dari pemerintah, tidak ada kepentingan dari luar. Kepentingan pemerintah ini meliputi kepentingan dalam penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat, serta kepentingan dalam meningkatkan ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga dengan memanfaatkan pekarangan.

Gambar 1

Kerangka Pikir Pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2021.

Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan kerangka pikir atau sebab dilaksankannya program P2L oleh pemerintah. Dimana program P2L merupakan wujud dari upaya Pemerintah Indonesia mengatasi permasalah ketahanan pangan negara, melihat banyaknya angka kasus *stunting* serta data pola konsumsi masyarakat yang belum beragam, sehingga melalui pemanfaatan potensi lahan pekarangan dibentuk sebuah kebijakan dalam

upaya peningkatan penyediaan dan akses kebutuhan pangan melalui pendekatakan diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan dengan berbagai kegiatan yang ada dalam program yang nantinya akan meningkatkan ketersediaan, aksesbilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga, serta dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, sehingga pada akhirnya akan mewujudkan generasi sehat, aktif, dan produktif.

2) Jenis manfaat yang dihasilkan

Manfaat yang dihasilkan yang dihasilkan menyangkut manfaat yang ditetentukan serta alokasinya di lapangan yang dirasakan oleh anggota KWT maupun masyarakat sekitar. Temuan di lapangan menunjukkan terkait dengan manfaat yang dihasilkan ialah lahan pekarangan menjadi termanfaatkan untuk kegiatan pertanaman berbagai jenis sayur, terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dengan tersediaanya jenis pangan dengan mudah, menghasilkan kemandirian KWT dalam memperoleh uang kas sendiri meski dalam jumlah yang belum cukup, serta manfaat yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan atau perekonomian masyarakat yang belum dapat sepenuhnya dirasakan oleh anggota KWT, ketersediaannya hanya cukup untuk dikonsumsi. Selain daripada manfaat yang diterima oleh anggota kelompok, manfaat yang dihasilkan dari program juga berkaitan dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar yaitu melalui dukungan penyediaan pangan serta diberikan ilmu atau teknik bagaimana cara menanam yang baik.

3) Derajat perubahan yang diinginkan

Derajat perubahan yang diinginkan. Perubahan ini menyangkut perubahan volume jumlah bibi yang disemai setiap kali melakukan proses pertanaman, belum sepenuhnya dapat terlihat yang dipengaruhi oleh faktor banyaknya KWT yang sudah tidak lagi melakukan pertanaman serta tidak rutinnya pencatatan hasil produksi yang dilakukan oleh KWT, kemudian perubahan lain menyangkut perubahan keaktifan sebelum dan sesudah mendapatkan program dirasakan oleh anggota KWT dimana

sebelum mendapatkan program P2L kegiatan KWT hanya mengandalkan bantuan bibit dari pihak dinas maupun penyuluh, kemudian perubahan pola pikir juga dirasakan oleh anggota KWT mengenai pentingnya menanam sayur serta konsumsi dayur bagi masyarakat, perubahan lain yaitu perubahan penegtahuan mengenai teknik menanam yang baik juga dirasakan oleh anggota KWT serta cara mengenadilkan hama, perubahan keterampilan juga dirasakan lewat pengemasan hasil panen yang lebih modern. Adapun perubahan juga dirasakan oleh masyarakat sekitar, adapun perubahan yang dirasakan tersebut menyangkut lingkugan yang lebih hijau, serta kerjasama yang lebih erat antar masyarakat.

Gambar 2

Kemasan Hasil Panen Kelompok Wanita Tani (KWT)

Sumber: peneliti, 2024.

Gambar 2 menunjukkan hasil panen yang diperoleh oleh KWT dalam kegiatan pertanaman di rumah bibit dan demplot yang kemudian dikemas dengan *strerofoam* serta plastik *wrap* serta diberika stiker betuliskan KWT. Teknik pengemasan ini berbeda dari pengemasan yang dilakukan sebelumnya, dimana hanya menggunakan alat-alat sederhana, setelah KWT mendapatkan program P2L, kemudian difasilitasi berbagai alat dan media mengemas yang lebih modern.

4) Kedudukan pembuat kebijakan

Kedudukan pembuat kebijakan berkaitan dengan apakah kebijakan atau program yang diimplementasikan telah terletak pada kebutuhan

masyarakat. Adapun temuan lapangan menunjukkan bahwa program P2L merupakan program yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebab memfasiliasi masyarakat dalam proses penananaman, serta menjadi harapan dari masyarakat dalam upaya penigkatan ekonomi masyarakat yang dapat terpengaruhi dengan penerimaan manfaat program P2L.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terus mengalami perkembangan maupun penurunan termasuk di Kota Serang.

Tabel 3

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang Tahun 2019-2023

No	Tahun	LPE (%)
1	2019	6,20
2	2020	-1,29
3	2021	3,88
4	2022	4,71
5	2023	4,47

Sumber: Olah data penelitian dari Pemerintah Kota Serang, 2024.

Berdasarkan Tabel 3 tersebut, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Serang pada tahun 2020 terkontraksi sebesar -1,29 persen, persentase tersebut sangat rendah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 6,20 persen. Sehingga berdasarkan hasil tersebut, perekonomian Kota Serang mengalami permasalahan yang cukup terpengaruh dari adanya wabah Covid-19 yang juga dirasakan oleh masyarakat, termasuk masyarakat Kecamatan Curug. Masyarakat di Kecamatan Curug mengalami permasalahan ekonomi yang dirasakan dampak dari adanya Covid-19 yang berdampak pada pemenuhan pangan masyarakat, sehingga melalui keikutsertaan masyarakat menjalankan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pemenuhan pangan masyarakat dapat terbantu.

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah banyaknya rumah tangga yang melakukan minimal satu jenis kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri). Hal ini juga memperlihatkan jumlah minat masyarakat yang tinggi dalam kegiatan pertanaman tanaman pangan. Masyarakat di Kecamatan Curug memiliki minat yang cukup tinggi di bidang pertanaman tanaman pangan, adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 4

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Per-Kecamatan di Kota Serang

No	Kecamatan	Rumah Tangga Usaha Pertanian
1	Curug	2,905
2	Walantaka	4,317
3	Cipocok Jaya	1,497
4	Serang	375
5	Taktakan	3,156
6	Kasemen	6,136

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2024.

Berdasarkan Tabel 4 tersebut, dapat terlihat bahwa masyarakat di Kecamatan Curug yang melakukan kegiatan pertanian dalam usaha pertanaman berbagai tanaman pangan sebanyak 2,905 rumah tangga. Jumlahnya cukup tinggi jika dibandingkan dengan Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan serang. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki minat yang tinggi dalam kegiatan pertanaman, sehingga program P2L memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pertanaman lebih baik dengan disediakan berbagai sarana dan prasarana serta peralat tanam.

5) Siapa pelaksana program

Siapa pelaksana program. temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksana program P2L adalah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Serang, penyuluh di Balai Penyuluh Pertanian yang tergabung dalam tim teknis program, serta KWT sebagai penerima manfaat program. Adapun tugas dari pihak-pihak yang terlibat yaitu seperti DKP3 mengurusi tanggung jawab teknis program, penyuluh berperan sebagai pendamping program di lapangan yang paling dekat dengan KWT, serta KWT yang menajlaankan kegiatan dalam program P2L.

6) Sumber daya yang dikerahkan

Sumber daya dalam hal ini menyangkut sumber daya manusia, sumber daya finansial, serta sumber daya sarana dan prasarana. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program masih dalam jumlah yang minim, jumlah penyuluh berjumlah 4 orang dengan satu penyuluh perbantuan dimana berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 satu penyuluh mendampingi 8 sampai 16 kelompok tani dengan 85 kelompok tani sehingga jumlah yang tersedia kurang, serta sumber daya manusia yaitu anggota KWT yang terus mengalami penurunan, penurunan ini banyak disebabkan salah satu faktornya karena mayoritas anggota KWT memiliki kesibukan atau pekerjaan lain yang utama. Sumber daya finansial dialokasikan melalui penyaluran satu kali per kelompok sasaran serta dari penyediaan uang kas, penyediaan uang kas belum dapat dirasakan oleh semua KWT karena banyak dari KWT yang sudah tidak lagi melakukan pertanaman. Kemudian sumber daya sarana dan prasarana program telah banyak mengalami kerusakan seeprti atap rumah bibit, sarana pengairan sumur bor tidak lagi tersedia, ketersediaan lahan yang bermasalah, alat pengukur PH tanah yang ketersediaanya tidak dimiliki oleh penyuluh.

2. Lingkungan Kebijakan

1) Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang terlibat

Lingkungan kebijakan pada sub dimensi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Dimana temuan dilapangan menunjukkan

terkait dengan kekuasaan, kepentingan dari DKP3 melakukan pemberian informasi, mengalokasikan program, melakukan survei lokasi KWT. Kepentingan dari penyuluh menyalurkan informasi, melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada KWT, melakukan perbantuan pemasaran hasil produk pertanaman, Pihak-pihak ini melakukan koordinasi dengan menjalin komunikasi yang intensif, memberikan perbantuan terkait kekurangan tenaga penyuluh di lapangan, melakukan koordinasi berjenjang, adapun koordinasi antara penyuluh dan KWT dilakukan melalui komunikasi melalui WhatsApp grup untuk menyalurkan informasi ataupun pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh KWT. Adapun terkait dengan strategi tidak terdapat strategi khusus yang dilakukan dalam pelaksnaaan program, trategi yang dilakukan berkaitan penyelenggaran sesuai dengan tugas yang dibebankan yaitu melakukan langsung pendampingan kepada anggota KWT.

2) Karakteristik Institusi dan Rezim

Karakteristik ini menyangkut dukungan yang diberikan serta karakteristik lain yang berkaitan dengan bagaimana instansi dalam karakteristiknya pada program P2L. Dukungan dari pemerintah Kota Serang melibatkan KWT dalam kegiatan bazar yang dilakukan, serta penyediaan dana untuk bimbingan teknis yang dilakukan kepada KWT.

3) Tingkah Kepatuhan dan Responsivitas Pelaksana

Tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana. Ditemukan fakta dilapangan bahwa tingkat kepatuhan anggota KWT belum maksimal, dengan ditemukan banyaknya anggota KWT yang tidak hadir dalam setiap pertemuan maupun jadwal piket yang telah ditentukan. Serta tingkat responsivitas dalam memberikan respon terhadap informasi yang diberikan oleh penyuluh juga belum maksimal, dengan lambatnya respon yang diberikan. Kemudian tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana yang selanjutnya yaitu DKP3 dan Penyuluh di BPP telah melaksanakan tugasnya dalam meberikan pendampingan kepada KWT, adapun pelaksnaan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh kepada KWT

pelaksanaannya menjadi semakin jarang, dimana pendampingan pada awal program dilaksanakan seminggu sekali sedangkan intensitasnya sekarang menjadi satu bulan sekali.

SIMPULAN

Pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kecamatan Curug masih belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan masih terdpat beberapa kekurangan dan hambatan yang terjadi seperti minimnya penyuluh pendamping program, berhentinya kegiatan pertanaman dibeberapa KWT, menurunnya kekatifan anggota, ketersediaan sarana dan prasarana yang minim, perjanjian peminjaman lahan yang buruk, ketersediaan uang kas yang tidak memadai. Oleh karena itu, program Pekarangan Pangan Lestari di Kecamatan Curug Kota Serang memerlukan perbaikan dan ini dilakukan dengan melakukan kerjasama antar berbagai pihak baik DKP3, penyuluh di BPP, maupun KWT sebagai penerima manfaat program, agar pelaksanaan KWT dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pangan Nasional. (2024). Indeks Ketahanan Pangan. *Badan Pangan Nasional.*

Badan Pusat Statistik. (2024). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian Tahun 2023. *Badan Pusat Statistik Kota Serang*.

Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, *1*(2), 70–79.

Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Serang. (2024). Data Kelompok Wanita Tani 2024. *Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Serang.*

Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan kota Serang. (2024). Indeks Komposit Bulanan Per-Kecamatan di Kota Serang Tahun 2023. *Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Serang.*

Oktarina, R. H., Sayekti, W. D., & Lestari, D. A. H. (2023). Aksesibilitas Dan Pola Konsumsi Pangan Peserta Dan Bukan Peserta Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Di Pekon Bahway Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, *11*(1), 1.

Syaifullah, A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Program Kerja Pekarangan Pangan Lestari pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021.